



# **RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

(Tertanggal 14 Oktober 2020)

## **DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**



<http://dinsos.bulelengkab.go.id>



[dinsos@bulelengkab.go.id](mailto:dinsos@bulelengkab.go.id)



(0362) 21248

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen

Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 14 Oktober 2020

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, 



**I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM.**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .....	2
1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja.....	3
BAB II    RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA .....	5
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	5
2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama .....	10
BAB III   PENUTUP .....	12
LAMPIARAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi padahasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagimasyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematik ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng dalam upaya terwujudnya masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing berlandaskan Tri Hita

Karena melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## 1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Penetapan Peraturan Bupati ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain adalah sebagai berikut :

- Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
  1. Sekretaris terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    - a. Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia
    - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
    - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
  3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
    - a. Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana
    - b. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga



- c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
- 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
  - c. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- 5. UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan
  - b. Kepala Tata Usaha UPTD Monumen dan Tugu Perjuangan

### **1.3 Tujuan Indikator Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja**

Rencana aksi Atas Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public

- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel Sedangkan tujuan khususnya adalah :
  - a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
  - b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
  - c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
  - d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
  - e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 dalam pencapaian Misi 1 yaitu :

Tabel 2.1.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<b>VISI</b> : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i>			
<b>MISI I</b> : Memantapkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.</li><li>• Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial.</li><li>• Peningkatan upaya pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.</li></ul>

Tabel 2.1.2

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar.	Peningkatan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang tertangani	2,75%	5,8%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinsos
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .	Sosial	Dinsos
	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS.	Peningkatan upaya pemberdayaa n fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4,28%	20,5%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sosial	Dinsos
						Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Sosial	Dinsos

## A. Strategi Dan Arah Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022, sebagai berikut :

### 1. Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai upaya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara optimal yaitu : **Peningkatan Aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan usaha ekonomi bagi PMKS**, meliputi :

- a. Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.
- b. Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial
- d. Menyelenggarakan perlindungan sosial, pemberdayaan dan pengembangan sosial.

### 2. Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam mengembangkan atau melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi pembangunan.

Penetapan kebijakan akan dapat mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana seluruh elemen mengetahui tentang apa peran dan tanggung jawab masing-masing elemen dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi PMKS***  
melalui meningkatkan kualitas Kesejahteraan Sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. ***Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS/Masyarakat miskin*** melalui Penggalan dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.
3. ***Meningkatkan potensi sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme*** melalui meningkatkan dan memperkuat nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dalam memantapkan revolusi mental bagi generasi muda dan masyarakat .

Tabel 2.1.3

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial dan kesejahteraan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).	Menyelenggarakan perlindungan sosial, bantuan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta pemberdayaan dan pengembangan sosial.	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, partisipasi dan jangkauan pelayanan PSKS dalam Penanganan PMKS.	Mengembangkan partisipasi masyarakat lembaga atau organisasi sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	Meningkatkan peran aktif dan profesionalisme pelayanan sosial, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat ataupun dunia usaha terhadap PMKS sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial .
Meningkatnya Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.	Mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Meningkatkan potensi dan sumber daya dalam penanaman nilai kepahlawanan dan jiwa nasionalisme sesuai UU nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

## 2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja Utama adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja Utama suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja Utama dalam Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja utama, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak

dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja sebagai Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja).



## BAB III

### P E N U T U P

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut dari Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai. Dengan Dokumen Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini dapat melaporkan keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*Good Governance*) atau Pemerintah yang berdayaguna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Singaraja, 14 Oktober 2020

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

  
**I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM.**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199103 1 053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Eselon II</b>										
	<b>Kepala Dinas</b>										
I.	Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	0,00%	0,15%	0,30%	0,63%					Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
							Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah pendamping sosial yang dibina	184.353.000	
								Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE	133.839.200	
								Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	64.060.000	
							Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi	525.000	
								Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling	828.400	
								Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	1.477.736.300	
								Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak nakal.	Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha	41.203.000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Program pembinaan anak terlantar	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan keterampilan berusaha dan mendapat bantuan sosial	96.064.900	
							Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha	22.695.400	
								Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial	92.032.800	
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah masalah strategi bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani	341.717.000	
								Pemutahiran data penduduk miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah data penduduk miskin dan PMKS yang tersusun	99.223.400	
								Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	Jumlah jenis lembaga perlindungan sosial	204.963.600	
							Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan	30.316.000	
								Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial	192.210.000	
II.	Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif.	0,00%	20,00%	40,00%	80%					
							Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial	61.348.100	
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial	46.029.800	
								Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah WKSBM (Karang Taruna) yang meningkat dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial	3.680.700	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Karang Taruna, PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan	46.560.500	

Singaraja, 14 Oktober 2020  
Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng



I Putu Kariaman Putra, S.Sos.MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.196912311991031053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ESELON III										
A.	Sekretaris										
I	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	25%	50%	75%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	43.784.400	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening, telepon, air, dan listrik yang terbayarkan	160.902.000	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis kendaraan dinas	212.240.000	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya	8.000.000	
								Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jenis laporan keuangan	166.192.200	
								Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah lingkungan kantor terpelihara	157.434.000	
								Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	19.364.700	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	14.667.500	
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	8.308.000	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang undangan yang tersedia	6.600.000	
								Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	13.168.000	
								Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah kali koordinasi dilaksanakan	57.878.800	
								Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	154.811.000	
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan	-	


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	3 Bulan	6 Bulan	9 Bulan	12 Bulan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	8.500.000	
								Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan	39.195.000	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman	53.255.450	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	45.350.000	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	25.000.000	
								Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah kegiatan lomba yang diikuti	26.250.000	
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah dokumen penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu	2 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	5 Jenis Dokumen	7 Jenis Dokumen	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun	52.741.000	
		Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	25%	50%	75%	100%	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun	106.617.900	
B.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin										
	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	370 Orang / Lembaga	370 Orang / Lembaga	370 Orang / Lembaga	400 Orang / Lembaga	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah pendamping sosial yang dibina	184.353.000	
								Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui KUBE	133.839.200	
								Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	64.060.000	
							Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial	61.348.100	

[illegible]



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik	Jumlah Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik	0 Orang	50 Orang	50 Orang	288 Orang	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah perempuan dan anak yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial, hukum berupa sosialisasi	525.000	
								Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang mengikuti KIE Konseling	828.400	
								Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	147.773.300	
								Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak nakal.	Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha	41.203.000	
							Program pembinaan anak terlantar	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja, jumlah anak terlantar penerima bantuan sembako	96.064.900	
							Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks narapidana yang mendapat pelatihan keterampilan dan bantuan usaha	22.695.400	
								Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina dan mendapat pelayanan sosial	92.032.800	
							Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan	30.316.000	
								Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial	192.210.000	

Singaraja, 14 Oktober 2020  
Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng



Puji Kariaman Putra, S.Sos.MM  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.196912311991031053

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2020**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>ESELON IV</b>										
	<b>A. Sekretariat</b>										
<b>1.</b>	<b>Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan</b>										
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah surat yang dikirim	500 Eksamplar	1000 Eksamplar	1500 Eksamplar	2000 Eksamplar	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar	43.784.400	
		Jumlah rekening, telepon, air, dan listrik yang terbayarkan	33 Rekening	66 Rekening	99 Rekening	132 Rekening		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening, telepon, air, dan listrik	160.902.000	
		Jumlah jenis kendaraan dinas	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit kendaraan	212.240.000	
		Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara izinnya	8 Unit	16 Unit	30 Unit	33 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	8.000.000	
		Jumlah jenis laporan keuangan	3 Laporan	6 Laporan	10 Laporan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan	166.192.200	
		Jumlah lingkungan kantor terpelihara	7 Unit	14 Unit	23 Unit	28 Unit		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan, jumlah tenaga kebersihan	157.434.000	
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	13 Unit	26 Unit	47 Unit	52 Unit		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	19.364.700	
		Jumlah dan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 Unit	6 Unit	9 Unit	12 Unit		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	14.667.500	
		Jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	3 Unit	6 Unit	9 Unit	12 Unit		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	8.308.000	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah bahan-bahan bacaan dan perundang undangan yang tersedia	3 Unit	6 Unit	9 Unit	12 Unit		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.600.000	
		Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	3 Unit	6 Unit	9 Unit	12 Unit		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	13.168.000	
		Jumlah kali koordinasi dilaksanakan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan		Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah/dalam daerah	57.878.800	
		Jumlah dan tercatatnya administrasi kepegawaian lingkup SKPD	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	154.811.000	
		Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan	-	-	-	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah kali pembinaan iman pegawai dilaksanakan	-	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	8.500.000	
		Jumlah kali terselenggaranya upacara keagamaan	5 Unit	10 Unit	15 Unit	21 Unit		Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah terselenggaranya upacara keagamaan	39.195.000	
		Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman	0 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ketersediaan tempat kerja yang nyaman	53.255.450	
		Jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	3 Unit	6 Unit	9 Unit	13 Unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	45.350.000	
		Jumlah peralatan gedung/kantor yang memadai	7 Unit	14 Unit	21 Unit	29 Unit		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	25.000.000	
		Jumlah kegiatan lomba yang diikuti	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit		Partisipasi Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah dan Pelaksanaan Event Nasional/Daerah	Jumlah kegiatan lomba	26.250.000	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan										
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Jumlah dan jenis dokumen laporan disusun	1,75 Laporan	3,5 Laporan	5,25 Laporan	7 Laporan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas sosial	52.741.000	
		Jumlah dan jenis dokumen anggaran disusun	2 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	8 Laporan	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran	106.617.900	
B.	Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin										
1.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat										
	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah Panti yang diberdayakan dalam pelayanan sosial	0 Panti Asuhan	0 Panti Asuhan	0 Panti Asuhan	4 Panti Asuhan	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah Pantiasuhan yang mendapat bantuan	61.348.100	
		Jumlah masyarakat dan PSKS yang mendapat penyuluhan sosial	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah peran aktif masyarakat dan dunia usaha	46.029.800	
		Jumlah WKSBM (Karang Taruna ) yang meningkat dalam pelaksanaan	0 Karang Taruna	0 Karang Taruna	0 Karang Taruna	0 Karang Taruna		Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat pelaksanaan usaha kesejahteraan	3.680.700	
		Jumlah Karang Taruna , PSM dan TKSK yang mendapat pembinaan	0 Karang Taruna, 0 PSM dan 0 TKSK	0 Karang Taruna, 0 PSM dan 0 TKSK	0 Karang Taruna, 0 PSM dan 0 TKSK	0 Karang Taruna, 0 PSM dan 0 TKSK		Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat pembinaan	46.560.500	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin										
	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah pendamping sosial yang dibina	148 Desa / Kelurahan	148 Desa / Kelurahan	148 Desa / Kelurahan	148 Desa / Kelurahan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin serta bantuan sembako kepada PMKS	184.353.000	
		Jumlah Fakir Miskin yang terampil dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif melalui KUBE	0 KUBE	0 KUBE	0 KUBE	6 KUBE		Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah Fakir Miskin yang mendapat bantuan UEP	133.839.200	
		Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang terampil dalam mengembangkan UEP	0 KUBE	0 KUBE	0 KUBE	4 KUBE		Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapat bantuan UEP	64.060.000	
3.	Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Dan Kesetiakawanan Sosial										
	Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Jumlah , jenis, kali model penanaman nilai kepahlawanan	370 Orang, 1 Kegiatan	370 Orang, 1 Kegiatan	370 Orang, 1 Kegiatan	370 Orang, 2 Kegiatan	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	Penanaman Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah pemahaman tentang nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	158.124.750	
		Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan yang	1, 25 Monumen	2,50 Monumen	3,75 Monumen	5 Monumen		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen/Tugu Perjuangan	Jumlah Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Monumen Tugu Perjuangan	75.116.600	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial										
1.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Pasca Bencana										
	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	Jumlah masalah strategi bencana, orang terlantar dan mayat terlantar yang tertangani	375 KK, 1 Orang, 0 Orang	375 KK, 1 Orang, 0 Orang	375 KK, 1 Orang, 0 Orang	2375 KK, 3 Orang, 3 Orang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	341.717.000	
2.	Kepala Seksi Pengolahan Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial										
	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	-	-	-	-	Program Informasi Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan dilaksanakan	-	
		Jumlah data penduduk miskin dan (PMKS) yang tersusun	37 Desa/Kelurahan	74 Desa/Kelurahan	111 Desa/Kelurahan	148 Desa/Kelurahan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemutahiran data penduduk miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya	Jumlah pemutahiran data penduduk miskin	99.223.400	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Keluarga										
	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial dan penanganan bencana	Jumlah jenis Lembaga Perlindungan Sosial	0,25 Lembaga	0,50 Lembaga	0,75 Lembaga	1 Lembaga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengembangan model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	Jumlah model kelembagaan perlindungan jaminan sosial	204.963.600	
D	Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial										
1.	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak Dan Lanjut Usia										
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	0 Orang	0 Orang	0 Orang	320 Orang	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan bimbingan motivasi kepada Lansia di luar panti	Jumlah lanjut usia di luar panti yang mendapat pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial	147.773.300	
		Jumlah anak nakal yang mengikuti pelatihan keterampilan berusaha	0 Anak	0 Anak	0 Anak	0 Anak		Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak nakal.	Jumlah anak nakal yang mendapat pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja	41.203.000	
		Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja, jumlah anaka terlantar penerima bantuan sembako	0 Anak	0 Anak	0 Anak	135 Anak	Program pembinaan anak terlantar	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja	96.064.900	
2.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas										
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang baik	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan keterampilan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	Pendidikan dan Pelatihan bagi Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah pelatihan bagi para penyandang disabilitas keterampilan	30.316.000	
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat daya guna dan bantuan sosial	50 Orang	0 Orang	0 Orang	288 Orang		Pendayagunaan Para Penyandang Disabilitas dan eks Trauma	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma	192.210.000	



[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target/Satuan				PROGRAM	KEGIATAN		Anggaran	Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Uraian	Indikator Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatnya nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	Jumlah Monumen dan Tugu Perjuangan yang dipelihara	1,25 Monumen	2,50 Monumen	3,75 Monumen	5 Monumen	Program Pelestarian Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial	Pemeliharaan UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	Jumlah UPT Monumen dan Tugu Perjuangan	699.069.600	

Singaraja, 14 Oktober 2020  
Kepala Dinas Sosial Kab. Buleleng



W. Putu Kariaman Putra, S.Sos.MM  
Pembina Tk.I (J/V/b)  
NIP.196912311991031053